



Harmoni dalam Keluarga: Konstruksi Hegemoni Patriarki Melalui Sastra Piwulang Pada masa Pemerintahan Pakubuwana IX

Yusro Edy Nugroho*, Prembayun Miji Lestari, Ucik Fuadiyah, Widodo

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

*yusronugroho@mail.unnes.ac.id

Abstract

“Harmony within the family” is a concept offered through sastra piwulang (didactic literature) during the reign of Pakubuwana IX at the Surakarta Palace. This concept underlies the construction of patriarchal hegemony embodied in several works of sastra piwulang, especially teachings intended for women at that time. This study focuses on analyzing sastra piwulang texts to understand how patriarchal ideology influenced social relationships and dynamics during that period, as well as how the concept of harmony was articulated through sastra piwulang. The results of the analysis show that almost all piwulang texts for women consistently carry the message of “family harmony,” which reinforces patriarchal domination in society and governance. This is reflected in the roles assigned to women, who were not entirely free to manage their existence and self-actualization. Concepts of power, control, and decision-making were held by men, resulting in gender inequality within the family. Amid this patriarchal domination, sastra piwulang functioned as a medium to articulate values that emphasized harmony within the family. The findings of this study can serve as a foundation for repositioning the role of women within Indonesian families, particularly Javanese families, in the development of gender equality programs in contemporary society.

Keywords: Family Harmony; Patriarchy; Sastra Piwulang; Sociology of Literature

Abstrak

“Harmoni dalam keluarga” adalah sebuah konsep yang ditawarkan melalui sastra piwulang pada masa pemerintahan Pakubuwana IX di Kraton Surakarta. Konsep ini melatarbelakangi konstruksi hegemoni patriarki yang terwujud dalam beberapa sastra piwulang, khususnya piwulang bagi perempuan pada masa itu. Fokus penelitian ini adalah kajian teks sastra piwulang untuk memahami bagaimana ideologi patriarki memengaruhi hubungan dan dinamika sosial pada masa tersebut, serta bagaimana konsep harmoni diartikulasikan melalui karya sastra piwulang. Dari hasil analisis diketahui bahwa hampir semua teks piwulang bagi perempuan selalu membawa pesan “harmoni dalam keluarga” yang menguatkan dominasi patriarki dalam masyarakat dan pemerintahan. Hal ini tercermin dalam peran yang diemban oleh perempuan, yang tidak sepenuhnya leluasa dalam mengatur eksistensi dan aktualisasi diri. Konsep kekuasaan, kontrol, dan pengambilan keputusan dipegang oleh pihak laki-laki, yang mengakibatkan ketidaksetaraan gender dalam keluarga. Di tengah dominasi patriarki tersebut, sastra piwulang menjadi alat untuk mengartikulasikan nilai-nilai yang mengedepankan harmoni dalam keluarga. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk memdudukan kembali peran perempuan dalam keluarga Indonesia, khususnya keluarga Jawa dalam pembangunan program kesetaraan gender pada kehidupan masyarakat saat ini..

Kata Kunci: Harmoni keluarga; Patriarki; Sastra Piwulang; Sosiologi Sastra

Pendahuluan

Dalam kebudayaan Jawa pernikahan merupakan salah satu sarana untuk menyatukan ikatan dua keluarga yang berbeda. Setiap kelompok sosial pada umumnya akan menikahkan anaknya dengan orang dari golongan yang satu visi atau sederajat. Sriyadi dan Pramutomo (2020) menjelaskan bahwa ada kecenderungan dalam keluarga bangsawan di kraton=kraton Jawa untuk mempertahankan keterjalinan kekuasaan dan hubungan sosial kekerabatan antar dinasti dengan sarana lembaga perkawinan Strategi ini merupakan implementasi pendekatan kultural pascaperang Jawa, yakni dengan menggunakan pendekatan kebudayaan atau pernikahan. John Watkins (2018) menjelaskan bahwa praktik ini dijalankan oleh dinasti kraton yang memiliki kepentingan untuk menyatukan, mengembangkan kekuasaan, atau membentuk aliansi politik yang kuat. Praktik ini juga dilaksanakan oleh banyak kerajaan dan dipandang sebagai cara yang berhasil untuk meningkatkan hubungan baik dua kerajaan.

Praktik pernikahan dan tujuan politik ini dapat ditemukan di beberapa kerajaan. Freed (1995) menjelaskan praktik-praktik pernikahan politik dilatarbelakangi atau menimbulkan pengaruh politik yang mengiringinya. Ia mencontohkan pernikahan bangsawan di Austria yang seringkali bertendensi dengan politik dan kepentingan kerajaan pada tahun 1190an. Dalam bab lain, ia juga menyinggung adanya hak waris yang muncul untuk mempertahankan kedudukan, warisan, dan pengaruh perpolitikan itu. Praktik ini juga dijalankan oleh Majapahit dalam upaya melanggengkan kekuasaannya. Pernikahan politik antarkeluarga Majapahit adalah jejak adanya pernikahan politik masa Singhasari. Mereka yang berstatus sebagai keluarga kerajaan, berhak mengeluarkan prasasti tentang daerah Sima atau kebijakan lainnya. Model ini berkembang menjadi sarana rekonsiliasi politik dalam balutan nuansa yang lebih 'cair'. Status raja-raja dalam kekeluargaan, akan tergantikan dengan peran ayah- menantu.

Dalam khasanah kesusasteraan Jawa, era abad 19 menjadi puncak budaya yang menempatkan kesusasteraan dalam panggung politik dan sosial yang sedemikian rumit. Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan masifnya pengaruh Belanda dan kuatnya kekuasaan kraton di Jawa menempatkan karya sastra sebagai sebuah wacana yang dapat digunakan untuk menyebarkan kapitalisme budaya. Hal ini disebabkan dalam kapital budaya terdapat sebuah klasifikasi kelas yang didasarkan pada budaya yang dialami oleh individu atau kelompok orang (Karman, 2017). Oleh karena itu maka, raja dan pujangga kraton dapat dikatakan sebagai lembaga yang berkuasa mengkapitalisasi budaya berupa teks-teks sastra untuk kepentingan khusus dan tujuan-tujuan tertentu.

Sastra sebagai sebuah kebenaran mutlak mengilhami adanya kuasa pada kalangan tertentu untuk menciptakan sebuah pembenaran guna mengubah struktur lama. Pemikiran Ben Anderson terhadap bahasa-bahasa di Indonesia menunjukkan adanya sebuah upaya politik yang digunakan kalangan penguasa dalam menyuarakan kehendak melalui bahasa (Wibisono, 2020). Hal ini bisa terjadi karena dalam bahasa sastra—utamanya puisi—terdapat ambiguitas, tidak secara literer menyampaikan maksud dan tujuannya. Struktur gramatikal dalam teks puisi sebagaimana disebutkan oleh Luxemburg (1984), bisa berubah, bertambah, atau berkurang. Implikasinya adalah teks sastra puisi tersebut menjadi ajang untuk saling memaknai isi teks tersebut yang pada akhirnya berpengaruh menjadi sebuah wacana.

Sebelum memasuki keberadaan wacana dalam karya sastra, ada sebuah penanda kultural bahwa pada prinsipnya kekuasaan Jawa menekankan sebuah stabilitas atau harmonisme. Gelar-gelar kebangsawanan yang mengakuisisi keagungan dan kebesaran dunia, adalah citraan bagaimana penguasa yang menginginkan harmoni kehidupan bernegara (Moertono, 2016). Untuk membentuk harmoni itu, perlu adanya sebuah tuntunan dan tatanan yang mengakomodasi elemen politik menjadi sebuah pranata nilai

yang selaras dan harmonis. Moertono juga menuliskan bahwa implementasi itu diambil dari dwitunggal konsepsi Jawa tentang makrokosmos-mikrokosmos yang akhirnya berwujud pada pemahaman kawula-gusti yang mendudukkan kawula atau masyarakat sebagai klien dan gusti atau bangsawan yang memiliki patronase. Praktik kekuasaan patronase yang menjanjikan adanya taraf hidup yang baik dan iming-iming khusus dalam kultur Indonesia saat ini sebagaimana disebutkan oleh beberapa penelitian (Andhika, 2017; Widoyoko, 2018; Cahyati dan Lopo, 2019), juga terjadi pada masa abad 19 yang disalurkan melalui representasi karya sastra dan pernikahan. Sastra klasik menjadi arena politik pada saat itu karena hanya sebagian kecil kalangan istana yang diberikan akses untuk menciptakan, menulis, dan menyebarkan karya sastra itu sendiri. Sudewa (2001) menuliskan bahwa pada masa itu kraton menjelma menjadi sentra wilayah kekuasaan magi-politik dimana raja yang berkuasa bisa menjadi pujangga yang mengarang karya sastra. Hal ini tidak dijumpai pada masa-masa sebelumnya dimana kekuasaan penulisan sastra hanya dilakukan oleh kalangan intelektual tradisi yang kompeten di bidangnya. Salah satu teks yang diciptakan saat itu adalah beberapa variasi teks piwulang kepada wanita atau yang dikenal sebagai teks-teks serat wulang putri.

Dari hasil pembacaan awal pada korpus data teks-teks piwulang bagi perempuan di kraton Jawa ini terdapat pengaruh besar dalam lahirnya paradigma wanita Jawa yang memiliki kapabilitas lahir batin untuk mengabdikan kepada suaminya. Namun demikian, dari aspek penulisannya perlu dipertanyakan apakah dalam teks-teks tersebut benar-benar mengakomodasi keberadaan wanita dalam menentukan pendapatnya pada saat itu.

Budaya patriarki yang berkembang dalam karya sastra saat itu menjadi sebuah ukuran seberapa besar menancapnya pengaruh pria dalam menentukan kebijakan politik maupun keputusan ranah domestik saat itu. Pemisahan institusi wanita dalam kultur kerajaan memunculkan sebuah pandangan bahwa wanita hanya berhak mengatur apa saja yang sudah diberikan oleh pria (Nugroho, 2019). Sementara itu, Suhandjati (2018) menjelaskan bahwa dengan adanya sentralisasi pria memunculkan kemungkinan besar adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jika dalam satuan terkecil terjadi sebuah konflik, maka dalam unit yang lebih besar akan menjadi sebuah habit yang buruk. Hal ini menjadi paradoks manakala konsep harmonisme dan ketaatan wanita dalam keluarga pada sastra piwulang putri diterjemahkan dalam konteks sosial bermasyarakat saat ini. Fenomena ini memberikan sebuah pertanyaan bagaimana kuasa bahasa merepresentasikan makna harmoni keluarga dalam konteks sejarah teksnya.

Metode

Penelitian ini adalah sebuah usaha untuk menyajikan konsep “Harmoni dalam Keluarga” dalam teks-teks serat piwulang putri melalui pendekatan sosiologi sastra. Terdapat lima teks sumber, yaitu Serat Wulang Putri Adisara, Serat Darma Duhita, Serat Darma Rini, Serat Warayatna, dan Serat Candrarini yang dianalisis melalui model kajian strukturalisme genetik. Teks-teks yang menjadi sumber data penelitian ditulis pada masa pemerintahan Paku Buwana IX. Data yang dikaji adalah gagasan tentang harmoni dalam keluarga yang terdapat dalam kelima teks tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode heuristik untuk mendapatkan skema ide penelitian. Metode pembacaan heuristik menghasilkan pemahaman secara harfiah, makna langsung, makna tersurat, actual meaning, makna sesungguhnya, makna denotatif. Selanjutnya melakukan analisis dengan teori hegemoni Gramsci untuk menunjukkan bagaimana konstruksi hegemoni patriarki yang terwujud dalam beberapa sastra piwulang. Gramsci mengungkapkan hegemoni sebagai satu bentuk supermasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas yang lainnya, dengan bentuk supermasi lain yang ia namakan “dominasi” yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik (Sugiono, 1999:31)

Hasil dan Pembahasan

Para raja Jawa yang memegang kekuasaan tertinggi dinasti Mataram pada abad ke-19 menempatkan pemikiran tentang dominasi laki-laki terhadap wanita menjadi latar sosial kehidupan kerajaan dalam kurun waktu yang cukup lama. Hegemoni laki-laki terhadap perempuan terjadi dalam sistem pemikiran familialisme keraton Jawa. Ideologi familialisme (ideology of familialism) timbul dan dilestarikan melalui proses sejarah yang kompleks dalam kurun waktu yang cukup lama. Dijelaskan oleh Supriyanto (2008:10) bahwa struktur sastra merupakan bagian strukturasi yang lebih besar, yaitu dunia. Harmoni dalam berkeluarga sebagaimana dalam teks-teks piwulang putri tidak menampilkan realita sebenarnya, melainkan sebuah gagasan yang terselubung guna kepentingan khusus sesuai masanya. Teks ini tidak secara absolut menempatkan harmoni sebagai sebuah konsep saling melengkapi, tetapi sebuah gerakan yang mendikte. Peniruan, pengharusan, dan peringatan kultural menjadi sebuah citraan bahwa teks ini memiliki kekuatan dogmatis yang melembaga. Para putri raja dan perempuan kerabat istana dibekali pengetahuan tentang hak dan kewajiban perempuan melalui teks-teks piwulang putri. Sebagai seorang ayah dan juga penguasa, raja berusaha untuk memberikan perlindungan dan jaminan masa depan bagi putri-putrinya. Namun pada kenyataannya, kehadiran teks-teks piwulang putri yang dijadikan bacaan wajib di lingkungan keputren menjadi usaha dogmatis dominasi laki-laki terhadap perempuan melalui pembentukan sikap mbagun turut. Pemahaman tentang kewajiban seorang istri kepada suami tampak menonjol dalam latar pandangan ideologi politis keagamaan. Secara politis, dominasi laki-laki atas perempuan dalam masyarakat patriarki sepadan dengan dominasi raja pada rakyatnya. Keduanya membutuhkan ketundukkan yang menyeluruh.

1. Konsep Harmoni pada Serat Wulang Putri Adisara

Pokok ajaran disampaikan secara lugas dalam puisi ini berupa kepasrahan seorang perempuan kepada Tuhan, ikhlas lahir batin, kuat, dan harus selalu awas eling pada kodrat. Pada Serat Wulang Putri karya Nyi Adisara, tema yang dikedepankan adalah pengendalian diri. Seorang perempuan Jawa harus mampu mengendalikan dirinya dengan baik meliputi hati, pikiran, dan rasa agar dapat memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Jawa seperti yang terdapat dalam kutipan berikut.

tinindakken lawan patut, pinantes-pantes tinit, tinimbang lan isinira, nagara Surakarta di tan kena den kinukuhan, angkuh ing tyas anglakoni

(SWPA, Kinanthi: 2)

laladan karsaning napsu, sungkawa kasedan swami, nora nganggo miyak maya, maya- mayaning tyas ening, he ngger ywa mangkono sira, lalakoningsun puniki

(SWPA, Kinanthi: 14)

Seorang perempuan Jawa adalah mahkota. Ketika seorang perempuan Jawa tidak bisa mengendalikan semuanya, maka yang terjadi hanyalah keburukan semata. Perempuan pasti akan terlihat cantik jika memiliki sikap yang baik karena keutaman pada perempuan Jawa kecantikannya terletak pada hati. Seorang perempuan Jawa harus kuat hatinya, harus sanggup menerima keadaan yang diberikan Tuhan kepadanya.

Di dalam teks piwulang putri Nyi Adisara, dijelaskan bahwa terdapat empat ajaran utama bagi seorang perempuan Jawa. Empat ajaran utama itu yaitu (1) tawakal dan tabah dalam menerima cobaan; (2) tulus dan ikhlas dalam menerima kesulitan; (3) harus memiliki sikap jiwa yang halus dan suci, sehingga semakin tawakal dan percaya pada Tuhan; dan (4) harus memiliki rasa, sehingga dapat selalu waspada dan sadar akan Tuhan.

1. Jika mendapat musibah harus berbesar hati menyerahkan kepada Tuhan (*yen ketaman ing cuba kudu mangesthi budi temen lan tarima*)
2. Jika hati gundah gulana ikhlaslah lahir batin (*yen kataman rudah legawa lila den kesthi*)
3. Jadikan jiwa perempuan jiwa yang halus dan kuat (*lakuning jiwa ing sarehning dumadine jiwa nini wus alus kalawan suksci*)
4. Perjalanan batin seorang perempuan harus *awas eling* pada kodrat yang diberikan oleh Tuhan (*lakuning rahsa sarehning rahseku wus mulya kudu musthi awas eing marang kodrating hyang suksma*)

Bagan 1. Pokok Pikiran Serat Wulang Putri Adisara

Selain empat ajaran utama, penulis juga menuliskan empat cita-cita atau tujuan hidup yang harus diraih oleh seorang perempuan Jawa, yaitu *gunawan* (kepandaian), *wiryawan* (keluhuran), *hartawan* (kekayaan), dan *berawan* (mempunyai banyak anak). Berikut adalah petikan pupuh Maskumambang bait 9-11.

Gung agunge ing begja punika nini, mung kawan prakara, gunawan ingkang sawiji, kasantikan tegesira

Dwi wiryawan kaluhuran lire nini, kaping tri hartawan, sira den samya mangerti tegese pan kasugihan

Kapat berawan maksude nini, mapan sugih anak, mungguh laku pat prakawis, sayekti uwus tetela

(SWPA, Maskumambang: 9-11)

4 Hal yang harus diperhatikan perempuan dalam mendapatkan kebahagiaan:

1. *Gunawan*
2. *Wiryawan*
3. *Hartawan*
4. *Berawan*

Bagan 2. Pokok Pikiran Serat Wulang Putri Adisara

2. Konsep Harmoni pada Serat Darma Duhita

Dalam teks-teks piwulang putri kepatuhan istri kepada suami menjadi sesuatu hal yang utama seperti kepatuhan prajurit kepada rajanya, demikian pula kepatuhan istri kepada suaminya. Pada hakikatnya prajurit adalah hak raja sementara istri adalah hak suami. Memiliki rasa hormat kepada suami sama halnya dengan memiliki rasa hormat kepada raja. Dalam Serat Darmaduhita disebutkan bagaimana seorang istri bisa menjadi wanita yang cekatan, terampil, dan memiliki keahlian menjalankan konsep-konsep sesuai nama- nama jari. Salah satu konsep harmoni yang diusung adalah mengambil makna onomastika jari manis guna mendidik wanita agar bersikap manis.

Marmane sira puniku, ginawan dariji manis, dipunmanis netyanira, yen ana karsaning laki, apa maning yen angucap, ing wacana kudu manis.

Aja dhoso amarengut, nora merakaken ati, ing netya dipunsumringah, sanadyan rengu ing batin, yen ana ngarsaning priya, bungange ajana kari.

Terjemahan:

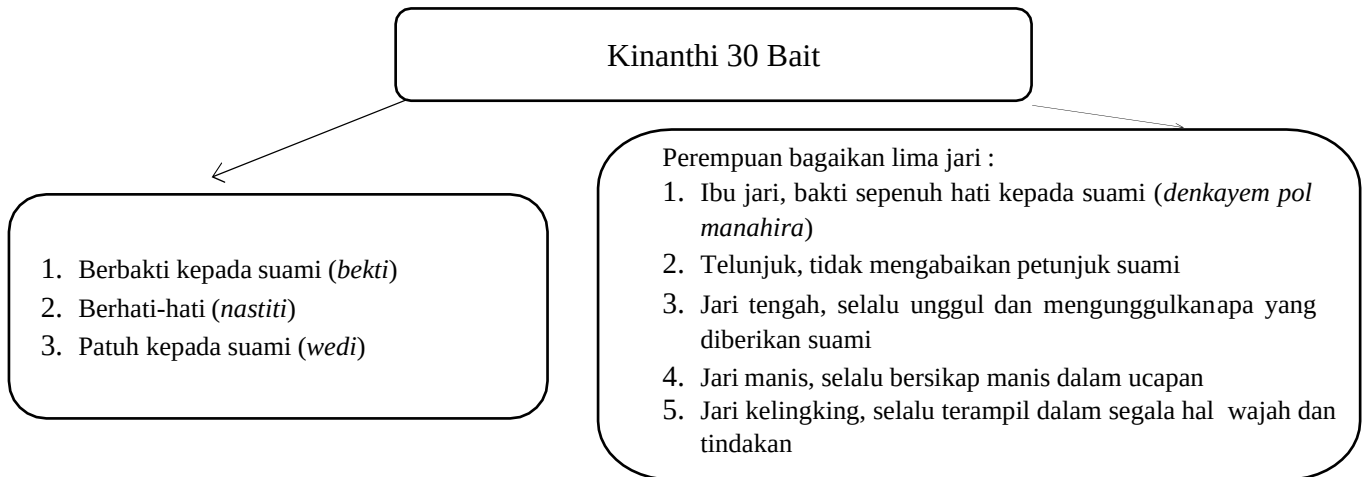
Oleh karena kamu itu, diberi jari manis, (maka) buatlah pandanganmu yang manis, jika ada didepan suami, apalagi ketika mengucap, dalam bertutur kata harus manis.

Jangan mengumbar wajah marah, tidak mengenakan hati, tampilkan wajah yang cerah, walaupun dalam hatimu gundah, jika ada di depan suaminya, tindakan itu jangan sampai ada yang terlupakan.

(Darmaduhita, I: 17-18)

Pada teks di atas, ada tendensi untuk memerintah sekaligus pesan untuk menjalankan konsep dalam idiom tersebut. Kontekstualisasi nilai dalam jari manis di kehidupan praktis sebagai bukti kesetiaan pernikahan melalui perkawinan, diejawantahkan kembali dalam keharusan berperilaku manis di hadapan suami. Lima jari dalam harmonisasi kehidupan keluarga adalah sebuah keseimbangan bahwa wanita yang menjaga keharmonisan memiliki komponen lengkap seperti jari jemari itu sendiri.

Berikut ini adalah peta konsep pokok pikiran dari *Serat Darma Duhita*.



Bagan 3. Pokok Pikiran *Serat Darma Duhita*

3. Konsep Harmoni pada *Serat Darma Rini*

Pada teks *Serat Darma Rini* diungkapkan secara langsung sembilan ajaran bagi perempuan yang akan menikah. Sembilan ajaran tersebut di antaranya adalah *mantep, temen, anarima apa sapanduming laki, sabar, berbakti pada suami, gemati, mituhu sabarang tuduh, rumeksen lathi bisa nyimpen ladhi, wiweka*. Seorang perempuan yang ditakdirkan menjadi istri seorang laki-laki adalah jodoh yang harus diterima sebagai sebuah dharma bakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

kang tinutur, marna reh mring para sunu, wanodya kang samya, manungku ing palakrami, pan mangkana ingkang pinedharing kata

(SDR, Pocung: 1-2)

Hegemoni laki-laki sedemikian tampak pada teks-teks piwulang terutama karena pengaruh besarnya kekuasaan raja terhadap para putri dan perempuan di dalam keraton. Dominasi kekuasaan ini terjadi karena adanya kepentingan politis yang sering diwujudkan dalam bentuk perkawinan antar dinasti kerajaan. Persoalan kehidupan poligami yang menjadi latar belakang lahirnya teks-teks piwulang putri juga tidak luput dari pandangan dunia pengarang. Perempuan diharuskan untuk menghindari perceraian dan hidup berdampingan dengan para madunya.

Berikut ini adalah peta konsep pokok-pokok pikiran dari *Serat Darma Rini*.



Bagan 4. Pokok Pikiran *Serat Darma Rini*

4. Konsep Harmoni pada *Serat Wara Yatna*

Serat Warayatna membicarakan bagaimana perempuan yang memiliki arti rahasia (*wadon=wadi*). Wadi artinya tidak boleh diketahui oleh orang lain, harus dijaga, dan tidak boleh diumbar di sembarang tempat. Perempuan adalah *wanodya*, ibarat kain adalah kain yang halus yang dikerjakan dengan baik. Jika kain tersebut terjual, maka yang akan memakai adalah orang-orang yang terhormat, syukur bisa dipakai oleh seorang raja. Perempuan yang diibaratkan dengan kain yang buruk adalah perempuan yang diibaratkan seperti kain batik yang dikerjakan dengan gegabah. Kain batik yang tidak baik biasanya hanya dipakai oleh masyarakat bawah, orang desa, dan murah harganya.

Melalui *serat Warayatna*, Pakubuwana IX memberi nasehat kepada wanita untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, aman tentram, dan bahagia lahir batin. Kemandirian wanita dalam berumah tangga berdampak pada situasi sosial.

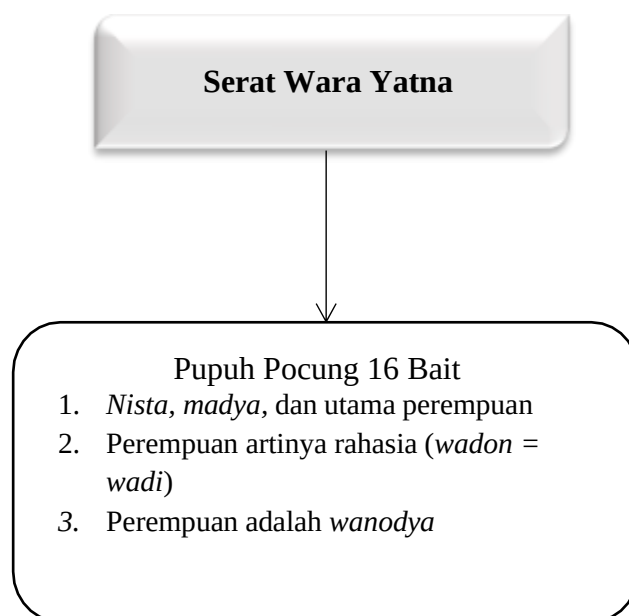
Ingsun cekak, supaya enggal dhinapur, nini putraningwang, estokena basa gati, basa wadon iku wadi tegesira

Milanipun, wadi tan kena kawetu, kudu rinuwatan, tan kena lerweh ing kardi, dipun sami eling jenenging wanodya

(SWY, Pocung: 9-10)

Pada *Serat Wara Yatna* disampaikan bahwa terdapat 3 sikap yang dimiliki oleh wanita yaitu *nistha*, *madya*, *utama*. Kemudian, dijelaskan pada bait berikutnya. *wanita nistha* ialah *lumayu anerjang palang* (suka menerjang rintangan), *wanita madya* ialah *sru gila lumayu ngenthir* (ikut-ikutan ngedan), *wanita utama* ialah *upamane sinjang dhasar alus ingkang mori* (bersikap halus seperti mori).

Berikut adalah peta konsep pokok-pokok pikiran dari *Serat Warayatna*



Bagan 5. Pokok Pikiran *Serat Warayatna*

5. Konsep Harmoni pada *Serat Candrarini*

Ajaran yang terkandung dalam *serat Candra Rini* secara garis besar menunjukkan bagaimana cara atau bersikap dan tindak tanduk seorang wanita agar terjaga keharmonisan kehidupan rumah tangganya meskipun dimadu. Pada zaman itu perempuan yang bercerai dianggap paling hina, sehingga sedapat mungkin seorang wanita mempertahankan rumah tangganya meskipun sang suami memutuskan untuk menikah lagi. Apabila wanita bercerai, maka hilanglah segala keutamaan dan tidak memenuhi kodratnya sebagai wanita karena itu sesuatu yang sangat hina. Seumpama orang yang sedang bertapa, maka gagallah semedinya.

Awit jenenging wanodya, pegat denny palakrami, nistha nir kadamnira, wigar denira dumadi, sami lan mangun teki, kang badhar subratanipun, punggel kaselan cipta, marma sagunging pawestri, marsudiya widadaning palakrama.

Terjemahan:

Sebab yang dikatakan wanita, (ketika) bercerai dari pernikahan, (ia) nista tidak memiliki darma, apa yang disumpahkan gagal, sama halnya dengan orang bertapa, maka gagal juga bertapanya, putus sudah yang ada, maka dari itu sebagai wanita, berusaha menyelamatkan pernikahan.

(Candrarini, I: 3)

Disharmoni dalam keluarga dewasa ini terjadi karena adanya beberapa fenomena sosial seperti tidak tercukupinya nafkah lahir dan batin. Munawaroh dan Azizah (2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa intensitas komunikasi memengaruhi keberlangsungan keluarga. Akan tetapi, dalam teks wulang putri ini sudah terbentuk nilai yang ditanamkan tentang tugas kewajiban perempuan. Teks tersebut tidak mengkomparasikan bagaimana harmoni dibentuk dari kesinambungan dua unsur pria dan wanita. Akan tetapi, wanita ditempatkan sebagai sosok yang dibebani kewajiban menjaga pernikahan. Perjuangan untuk mencapai harmoni dalam teks ini dikuatkan sebagai sebuah mandat suci dimana pengarang memosisikan diri sebagai validator. Jaminan adanya kemakmuran, kesuksesan, dan keberhasilan dalam berumah tangga akan didapatkan ketika bisa melaksanakan perintah orang tua sebagai wakil dari Tuhan. Adapun ketika melanggar amanat ini, anak perempuan akan mendapatkan kesusahan karena dikatakan tidak melaksanakan petunjuk tersebut.

Teks ini dikatakan sebagai bagian dari wulang putri menerangkan tentang pentingnya wanita meningkatkan kemampuan dirinya dalam mengelola keluarga (Nugroho, 2018). Dalam teks tersebut istri atau wanita sekalipun dikatakan memiliki keterbatasan gerak dibandingkan laki-laki, ia memiliki hak untuk mengembangkan sikap kebatinannya. Prinsipnya, nilai-nilai inilah yang ditularkan kepada anak cucu penguasa saat itu melalui ibu. Guna mendukung pengajaran kepada cucu-cucu penguasa tersebut, wanita yang berkewajiban untuk mendidik anak perlu diajarkan bagaimana membentuk karakter yang diinginkan dan tujuan politik yang diarahkan. Maka, wacana harmoni keluarga pada masa itu bukan untuk kalangan internal domestik melainkan untuk mengharmoniskan dua keluarga bangsawan yang terikat dalam nuansa kekuasaan.

Jalinan makna harmoni di masa lampau menekankan bagaimana wanita sebagai aktor penting yang bergerak untuk menjadi penyambung dua keluarga bangsawan. Narasi tentang penyatuan keluarga ini sudah menjadi ide masing-masing kerajaan untuk membangun kembali kekuasaan Mataram yang tunggal dibawah satu kerajaan tertentu. Hal ini dapat ditemukan dalam narasi di Babad Pakepung koleksi Universitas Indonesia bahwa setelah adanya pertempuran antara Belanda dan Yogyakarta melawan Surakarta. Setelah itu dilanjutkan pernikahan antara putra raja dengan putri Pangeran Adipati Anom. Narasi ini menjadi awal bahwa harmoni yang halus diwujudkan melalui pernikahan. Teks wulang putri adalah salah satu cara untuk mewujudkan ikatan dua kerajaan melalui wacana harmoni keluarga bangsawan. Secara praktis, di masa akhir abad XIX dijumpai pernikahan antarkeluarga Yogyakarta dengan Mangkunegaran, Surakarta dengan Paku Alaman, dan sebagainya.

Keharmonisan keluarga dibentuk melalui pengaplikasian hak dan kewajiban dan kedudukan yang setara. Namun demikian, dalam posisi tertentu teks wulang putri menjadi sebuah kerangka konseptual untuk merumuskan kembali bagaimana wanita bergerak mencapai kemampuannya. Teks ini tidak lagi menjadi wadah kungkungan patriarki, tetapi menjadi motivasi untuk setara dengan pria dalam hal-hal praktis seperti yang ditekankan dalam metafora jenthik dalam Darmaduhita yang maknanya cekatan.

Kesimpulan

Wacana harmoni keluarga adalah ranah diskursus yang sarat dengan pemaknaan kultural. Sebagaimana yang dikatakan Foucault tentang bahasa dan kekuasaan, implementasi bahasa teks piwulang putri di masa lampau adalah cerminan bahasa politik yang halus yang dibalut dalam nuansa kekeluargaan. Dengan adanya pernikahan, maka akan terbentuk aliansi sehingga mampu menguatkan kedudukan. Praktisnya, dalam teks ini disebutkan perlunya wanita yang taat kepada pria dengan cara meniru teladan yang disajikan dalam teks-teks piwulang. Selain itu, ada beberapa tujuan moral yang seyogianya dicapai untuk menjadi keluarga yang utama atau harmonis. Ada juga aspek perintah dan larangan—bahkan stereotip—untuk menegaskan pentingnya harmonisasi pernikahan itu sendiri. Di masa modern, harmoni keluarga sebagaimana dalam teks wulang putri tidak lagi menjadi sebuah kuasa bahasa pria tetapi menjadi sebuah ajang untuk memaknai kembali kedudukan pria dan wanita. Terminologi ranah domestik seperti kanca wingking, sabar lan nrima, pasrah, dan sebagainya, dipahami bukan dari wacana yang didikte oleh suami tetapi dibentuk dari realita sosial. Dengan demikian, restrukturisasi makna seringkali muncul dari narasi dominan yakni kanca wingking sebagai mitra yang sejajar maupun konsep nistha, madya, utama sebagai tujuan bersama untuk mencapai harmoni. Kendati mengalami perubahan saluran dari ranah domestik kerajaan menjadi institusi sosial, harmoni keluarga mengalami perubahan makna dan wacana berbanding lurus dengan kebijakan dan kondisi perpolitikan negara.

Daftar Pustaka

- Andhika, L. R. (2017). Bahaya Patronase dan Klientelisme dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak. *Kajian Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan*, 22(3), 205–220.
- Athoillah, A. (2019). *Patronase Politik di Keraton Yogyakarta Abad XIX*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Aziz, R., & Mangestuti, R. (2021). Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas pada Pasangan Suami Istri di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14(2), 129–139.
- Cahyati, D. D., & Lopo, Y. H. L. (2019). Daily Patronage Politics: A Village Chief's Route to Power. *PCD Journal Power Conflict Democracy*, 7(2), 169–196.
- Darwin, M. (2004). Gerakan Perempuan dari Masa ke Masa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(3), 283–294.
- Dewi, V. K., & Kasuma, G. (2014). Perempuan Masa Orde Baru: Studi Kebijakan PKK dan KB Tahun 1968–1983. *Verleden: Jurnal Kesenjarahan*, 4(2), 157–172.
- Dhona, H. R. (2020). Analisis Wacana Foucault dalam Studi Komunikasi [Using Foucauldian Discourse Analysis in Communication Studies]. *Journal Communication Spectrum*, 9(2), 189–208.
- Freed, J. B. (1995). The Politics of Marriage. In *Noble Bondsmen: Ministerial Marriages in the Archdiocese of Salzburg, 1100–1343* (pp. 181–217). Cornell University Press.
- Geertz, G. (1992). *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Graham-Brown, S. (1988). *Images of Women: The Portrayal of Women in Photography of the Middle East 1860–1950*. New York: Columbia University Press.
- Harahap, E. M. (2020). Genealogi Wacana Foucault terhadap Kumpulan Cerpen “Protes” Karya Putu Wijaya. *Jurnal Bahasa Indonesia Prima (JBIP)*, 2(1), 37–47.
- Karman. (2017). Bahasa dan Kekuasaan: Instrumen Simbolik Peraih Kekuasaan Versi Bourdieu. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 21(2), 235–246.
- Luxemburg, J. V., Bal, M., & Weststeijn, W. G. (1989). *Pengantar Ilmu Sastra* (D. Hartoko, Trans.). Jakarta: Gramedia.
- Moertono, S. (2017). *Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI–XIX*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Munawaroh, N. L., & Azizah, N. (2018). Disharmoni Keluarga Ditinjau dari Intensitas Komunikasi: Studi Kasus Satu Keluarga di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 12(2), 291–310.
- Nugroho, Y. E. (2018). *Wulang Putri: Tinjauan Filologis dan Hermeneutis Sastra Piwulang Karya Nyi Adisara*. Semarang: Cipta Prima Nusantara.
- Nugroho, Y. E. (2019). Represi dan Representasi Perempuan Jawa dalam Serat Piwulang. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES*, 950–961.
- Nurudin. (2003). *Komunikasi Massa*. Malang: Cespur.
- Permanadeli, R. (2018). *Wadon Representasi Sosial Perempuan Jawa di Era Modern*. Yogyakarta: Pustaka Ifada.
- Rokhim, M. N., Triana, D. E., Septiasih, A., Nivaga, P. S., & Janah, M. U. (2022). Metafora Konseptual Lima Jari dalam Sastra Jawa: Analisis Semantik Kognitif. *Sutasoma: Jurnal Sastra Jawa*, 10–21.
- Sarup, M. (2003). *Poststrukturalisme dan Posmodernisme*. Yogyakarta: Penerbit Jendela.
- Siswanto, J. (2003). Metafisika Wayang: Dimensi Ontologis Wayang sebagai Simbol Kehidupan. *Jurnal Filsafat*, 33(1), 73–85.

- Sobur, A. (2001). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sriyadi, S., & Pramutomo, R. M. (2020). Absorpsi Tari Bedhaya Bedhah Madiun Gaya Yogyakarta di Mangkunegaran Masa Pemerintahan Mangkunegara VII. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 5(1), 28–44.
- Suhandjati, S. (2018). Kepemimpinan Laki-Laki dalam Keluarga: Implementasinya pada Masyarakat Jawa. *Jurnal Theologia*, 28(2), 329–350.
- Suratno, P. (2016). Bahasa–Sastra sebagai Representasi Pemikiran–Kekuasaan. *International Seminar Prasasti III: Current Research in Linguistics*.
- Sudewa, A. (2001). Sastra dan Perkembangan Politik di Jawa Abad XVIII. *Humaniora*, 13(3), 240–251.
- Watkins, J. (2018). Marriage Diplomacy. In *The Encyclopedia of Diplomacy*. John Wiley & Sons Ltd.
- Wibisono, J., & Iqbal, M. (2020). *Maksud Politik Jahat: Benedict Anderson tentang Bahasa dan Kuasa*. Jakarta: Tanda Baca.
- Widoyoko, J. D. (2018). Politik, Patronase dan Pengadaan: Studi Kasus Korupsi Proyek Wisma Atlet. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(2), 1–23.
- Widyastuti, S. H. (2019). Nista Madya Utama, the Local Wisdom to Achieve Prosperity and Peace in the Digital Era. *Incolwis 2019*, Agustus 29–30.
- Yap, P. M. E. H., & Tan, B. H. (2011). Families' Experience of Harmony and Disharmony in Systemic Psychotherapy and Its Effects on Family Life. *Journal of Family Therapy*, 33, 302–331.